

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Integrasi Politik Dan Ekonomi Islam: Solusi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Rizki Ardiansyah¹, Kurrotul Uyun², Zaenab³

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; rizkiardiansyahirbas@gmail.com
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; kurrotuluyun@gmail.com
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; zaenab@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 20, 2024
Accepted : May 03, 2024

Revised : April 09, 2024
Available online : June 25, 2025

How to Cite: Rizki Ardiansyah, Kurrotul Uyun, & Zaenab. (2025). Integration of Islamic Politics and Economics: A Solution for Sustainable Development in Indonesia. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(2), 84–95. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i2.9>

Integration of Islamic Politics and Economics: A Solution for Sustainable Development in Indonesia

Abstract. This study aims to examine how the integration of Islamic politics and economics can be an effective solution to achieve sustainable development. Islamic principles, such as justice, balance, social responsibility, and welfare, are used as the basis for forming a political and economic framework that is oriented towards the welfare of the people. This study uses a qualitative approach using policy analysis to examine the perspectives of Islamic politics and economics in creating an inclusive, just, and sustainable environment in Indonesia.

Keywords: Integration of Islamic politics, Islamic economics, sustainable development, social justice, welfare.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana integrasi politik dan ekonomi Islam dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan, dijadikan dasar dalam membentuk kerangka politik dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis kebijakan untuk meneliti perspektif politik dan ekonomi Islam dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, and berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi politik Islam, ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu agenda prioritas bagi negara-negara di seluruh dunia dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan Politik (Solechah & Sugito, 2023). Dalam konteks global yang semakin kompleks, pembangunan berkelanjutan tidak hanya dianggap sebagai pilihan, tetapi sebagai keharusan. Ini disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan aktivitas ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan, dan keterasingan social. Tantangan yang telah dialami mirip dengan konstruksi konvensional, biasanya mempertimbangkan faktor social dan lingkungan, yang mengakibatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Model ekonomi kapitalis yang banyak diterapkan terbukti tidak mampu secara menyeluruh mengatasi masalah ketidakadilan dan kemiskinan (Kurniawan, 2009). Ketidakmampuan ini menunjukkan perlunya transformasi dalam cara kita memandang dan melaksanakan pembangunan.

Sebagai solusi alternatif, konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan holistik, dengan menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta tanggung jawab sosial (Sumarta, 2024). Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek social dan lingkungan (Pertwi & Herianingrum, 2024). Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh umat manusia, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap semua aspek ini.

Islam dalam ranah politik menekankan pentingnya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat (Panggabean & Harahap, 2024). Pemerintahan yang baik, dalam perspektif Islam, tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Hal ini mengharuskan pemimpin untuk bertindak adil dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil. Di sisi lain, ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata, pengurangan kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan (Amin, 2023). Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, ekonomi Islam berupaya untuk menciptakan sistem redistribusi kekayaan

yang dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung, serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, "Bagaimana integrasi antara politik dan ekonomi Islam dapat menjadi solusi yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia?" Penting untuk memperhatikan bahwa integrasi antara politik dan ekonomi Islam akan membutuhkan kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan Islam. Selain itu, pendekatan ini juga harus memperhitungkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi politik dan ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi nyata untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Integrasi Politik Islam

Integrasi nilai-nilai Islam dengan Pancasila, menjadi hal yang penting, sebagai langkah dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Bahwa proses integrasi ini diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodir golongan-golongan yang masih menolak Pancasila sebagai falsafah kebangsaan (Ridwan, 2017). Proses integrasi nilai-nilai Islam dengan Pancasila dapat dilakukan dengan menonjolkan keselarasan antara prinsip-prinsip Islam dan sila-sila Pancasila, seperti nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai produk konsensus nasional, tetapi juga sebagai platform yang merepresentasikan nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam. Edukasi yang berfokus pada pemahaman Pancasila sebagai falsafah yang inklusif dan tidak bertentangan dengan agama menjadi langkah strategis dalam mengurangi resistensi dan menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, integrasi ini dapat memperkuat semangat persatuan bangsa tanpa menghilangkan identitas keagamaan setiap individu.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negaranegara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lainnya. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat (FITRIA, 2016). Kemajuan ekonomi Islam di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menawarkan kurikulum berbasis syariah. Selain itu, praktik ekonomi Islam juga berkembang dengan pesat melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, hingga pasar modal syariah. Pemerintah pun turut mendukung dengan regulasi yang mengakomodasi praktik ekonomi syariah, seperti UU Perbankan Syariah dan UU Ekonomi Syariah. Tidak hanya itu, literasi

masyarakat tentang ekonomi Islam semakin meningkat seiring dengan promosi dan edukasi yang dilakukan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional, sekaligus menjadikannya salah satu model alternatif dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Ekonomi Pembangunan

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana pembangunan tersebut dapat dijalankan dan dinikmati secara terus menerus atau berkelanjutan (sustainable) (Fadilla et al., 2022). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable) menuntut perhatian pada tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pembangunan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara sosial, penting untuk memastikan adanya pengurangan kesenjangan, pemberdayaan komunitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pembangunan harus dilakukan dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, mengurangi emisi karbon, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Dengan pendekatan holistik ini, pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga melindungi hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama.

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya (Bakar, 2020). Prinsip ilahiyah dalam ekonomi Islam menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, yang mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam prinsip ini, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga setiap tindakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas secara luas. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi yang murni kapitalis, di mana persaingan sering menjadi inti utama. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong kerja sama, berbagi risiko, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, tercipta harmoni sosial dan ekonomi yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu kemaslahatan bagi semua pihak.

Keadilan Sosial

Dalam ajaran Islam, konsep kebaikan hati dan keadilan sosial menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Salah satu praktik yang sangat ditekankan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui institusi zakat. Zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan jalan untuk menggalang keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan

keharmonisan dan kesetaraan dalam masyarakat (Chairunisa & Gur, 2023). Institusi zakat dalam Islam memiliki peran strategis dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mewajibkan umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya, zakat menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif, mengalirkan sumber daya dari kelompok yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan golongan yang terlilit hutang. Selain itu, zakat juga mendorong tumbuhnya rasa empati dan solidaritas antarumat, menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat yang profesional dan transparan melalui lembaga zakat mampu memperluas dampaknya, seperti mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

Pengelolaan zakat yang profesional merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Profesionalisme dalam pendistribusian zakat memastikan bahwa dana yang terkumpul tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak, sesuai dengan asnaf yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, manajemen yang baik, seperti penggunaan teknologi modern untuk transparansi dan akuntabilitas, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu, zakat dapat dikelola tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk program-program produktif, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pembiayaan proyek pemberdayaan. Dengan demikian, zakat tidak hanya meringankan beban sementara, tetapi juga mendorong penerima zakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga akhirnya keluar dari lingkaran kemiskinan dan mampu berkontribusi kembali dalam pembangunan umat (Risal, 2021).

Kemaslahatan

Kemaslahatan dalam Islam adalah prinsip dasar yang menempatkan kesejahteraan dan kebaikan umat sebagai tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Dalam istilah syariah, kemaslahatan sering dikaitkan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Semua hukum Islam dirancang untuk memastikan terjaganya lima kebutuhan pokok ini, yang menjadi fondasi utama kehidupan manusia.

Kemaslahatan juga berorientasi pada terciptanya keadilan, harmoni, dan keseimbangan dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Dalam pemerintahan, kemaslahatan menjadi dasar kebijakan yang adil, transparan, dan pro-rakyat. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai panduan, Islam memastikan bahwa setiap tindakan manusia tidak hanya memberikan manfaat duniawi tetapi juga keberkahan ukhrawi. Kehadirannya penting dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi bagi paraarganya melalui kegiatan

pembelajaran dalam perkuliahan, dan untuk pengembangan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri (Darda, 2015). Pesantren juga memberikan lingkungan yang mendukung pembentukan kepribadian yang berintegritas dan memberdayakan santri untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan (Asdlori, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat kompleks dari integrasi politik dan ekonomi Islam, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi konsep-konsep tersebut dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pemahaman berbagai sumber tentang topik yang diteliti. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali literatur yang relevan dan terbaru mengenai integrasi antara politik dan ekonomi Islam.

Sumber data yang digunakan mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Penggunaan berbagai sumber ini membantu membangun kerangka pemahaman yang komprehensif dan mencakup berbagai perspektif dalam bidang yang diteliti. Dengan mengeksplorasi literatur yang ada, peneliti dapat mempertimbangkan konteks yang lebih luas serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana teori dan praktik integrasi politik dan ekonomi Islam diterapkan di berbagai negara atau daerah. Hal ini penting untuk memahami dinamika yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yang mencakup beberapa langkah penting. Data yang diperoleh dari berbagai literatur dikaji dan dianalisis berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti keadilan social, redistribusi kekayaan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara konsep-konsep tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala sesuatu dirasa semakin dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat berbelanja. Kini sistem pembayaran tak lagi hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada. Apalagi dengan adanya financial technology yang sudah marak didekitar kita (Prastiwi & Fitria, 2021). Perkembangan teknologi di era digital telah menghadirkan kemudahan luar biasa dalam sistem pembayaran melalui inovasi financial technology (fintech). Layanan seperti dompet digital, pembayaran berbasis QR code, hingga platform peer-to-peer lending kini memberikan alternatif transaksi yang lebih cepat, efisien, dan praktis dibandingkan metode konvensional seperti kartu kredit. Selain mempermudah belanja, fintech juga meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan. Namun, di tengah kemudahan ini, penting bagi pengguna untuk

memahami literasi keuangan digital agar dapat memanfaatkan teknologi ini secara aman dan bijak, serta menghindari risiko seperti penipuan atau kebocoran data.

Aturan-aturan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari kerusakan (fasad) di muka bumi, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk keberlanjutan kehidupan umat manusia dan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya gagasan pembangunan yang dipelopori oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Islam sebagai salah satu agama yang membawa konsep pembangunan berwawasan lingkungan juga memiliki aturan-aturan mengenai pemanfaatan lingkungan dalam al-Qur'an (Hakim, 2020).

Secara epistemologis, paradigma integrasi-interkoneksi muncul sebagai respons terhadap kesulitan yang telah lama dirasakan dalam peradaban Islam, terutama terkait dengan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemisahan ini sering kali menghambat penerapan nilai-nilai Islam yang berwawasan lingkungan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan keduanya, paradigma ini berusaha menyatukan pengetahuan agama dan ilmu umum, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dalam membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pemanfaatan alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan generasi yang memiliki pemahaman yang luas dan integral tentang peran mereka dalam menjaga kelestarian bumi. (Saftri & Sa'dudin, 2019).

Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (Arfah & Arif, n.d.). Prinsip dasar pembangunan dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan sumber daya alam sebagai modal/perantara untuk manusia dalam mencapai kemakmuran, disebut sebagai konsep *Falah*. Adanya keadilan terhadap alam dan manusia maka *Falah* akan bisa dicapai (Humaida et al., 2020).

Gejala tersebut menggambarkan partai-partai Islam belum optimal dalam mengelola konflik dan meningkatkan integrasi (Undang & Thamrin, 2017). Meskipun perdebatan tentang apakah aktivitas ekonomi saat ini sudah memenuhi kriteria keberlanjutan masih berlangsung, prinsip dasar pembangunan dalam ekonomi Islam memberikan pandangan yang berbeda, dengan menekankan pentingnya keadilan terhadap alam dan manusia dalam mencapai kemakmuran atau *Falah*. Dalam perspektif ini, Tuhan menciptakan sumber daya alam sebagai modal bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak dan adil. Konsep *Falah* ini mengharuskan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling mendukung untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Namun, gejala yang muncul menunjukkan bahwa partai-partai Islam belum sepenuhnya optimal dalam mengelola konflik dan memperkuat integrasi

antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan praktik pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih besar untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh umat.

Hal ini karena jika prinsip keadilan dan keberlanjutan tidak diterapkan dengan baik, maka akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan bagi keduanya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun demikian, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ketidakseimbangan ini bisa diibaratkan seperti perceraian yang menghilangkan kemaslahatan. Namun, ketika dihadapkan pada dua mafsadat yang saling bertentangan, seperti kerusakan ekologis yang lebih parah atau ketidakadilan sosial yang lebih mendalam, maka pilihan yang diambil haruslah yang menyebabkan mafsadat yang lebih ringan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi umat manusia dan alam semesta. Karena justeru akan mengakibatkan mafsadat bagi keduanya. Meskipun perceraian juga menghilangkan kemaslahatan, tetapi karena berhadapan pada dua mafsadat, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya (Nurdin et al., 2022).

Politik Islam saat ini memainkan peran yang sentral dalam mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan, baik di tingkat regional maupun internasional. Dengan semakin meningkatnya pengaruh negara-negara Muslim dalam berbagai forum internasional, pemikiran politik Islam turut memberikan kontribusi penting dalam perdebatan global mengenai isu-isu keadilan sosial, ekonomi berkelanjutan, hak asasi manusia, dan pluralisme. Pemahaman tentang politik Islam yang inklusif dan progresif, yang memadukan nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan modern, mampu memberikan alternatif solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dunia saat ini, seperti ketimpangan sosial dan perubahan iklim. Selain itu, politik Islam juga membuka ruang untuk mendalami hubungan antara agama dan negara, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di kancah global. Politik Islam saat ini memiliki peran yang sentral bagi mewarnai ilmu pengetahuan baik secara regional maupun Internasional (Yudha, 2021).

Permasalahan keadilan sosial adalah masalah ketimpangan yang akan menghilangkan keadaban dalam kehidupan manusia, dan akan memengaruhi kehidupan umat. Agama Islam harus senantiasa berpikir lebih maju untuk menjawab problem-problem nyata manusia saat ini, tidak membiarkan berlarut tanpa pemaknaan yang mendasar terhadap konsep kemanusiaan sejati (Sulbi, 2021). Permasalahan keadilan sosial, yang seringkali tercermin dalam ketimpangan ekonomi dan sosial, dapat merusak keadaban dalam kehidupan manusia dan mengancam stabilitas kehidupan umat. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memengaruhi harmoni sosial dan keharmonisan antar umat. Oleh karena itu, agama Islam, dengan ajaran-ajarannya yang universal dan adaptif, harus senantiasa berpikir lebih maju untuk memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan nyata yang dihadapi umat manusia saat ini. Islam tidak boleh membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut tanpa pemaknaan yang mendalam terhadap konsep kemanusiaan sejati yang

mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, ajaran Islam bisa menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang sejati. Potensi-potensi ini bila dimaksimalkan maka peranannya tentunya akan signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Nuradi et al., 2024).

KESIMPULAN

Integrasi Islam Pancasila sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, karena membantu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dan Pancasila, seperti kesetaraan, hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, dan keadilan sosial. Integrasi ini tidak hanya memperkuat persatuan bangsa namun juga menciptakan keharmonisan dalam menghadapi tantangan Masyarakat, sedangkan Ekonomi Islam memiliki potensi yang signifikan dalam bidang pendidikan dan praktik bisnis, dimana ekonomi Islam menjadi komponen kunci dalam sistem perekonomian nasional. Pemerintah melakukan promosi dan edukasi tentang ekonomi Islam melalui berbagai kebijakan, seperti pendidikan, praktik, dan institusi bisnis, dan Pembangunan ekonomi adalah aspek penting lainnya dari ekonomi Islam, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus fokus pada tiga bidang utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, menjamin kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan, dan Prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip kesetaraan, menekankan pentingnya hak-hak individu dan perlunya masyarakat yang harmonis. Prinsip ini mengutamakan kesetaraan antara individu dan masyarakat, mendorong kerja sama, pengambilan risiko, dan distribusi kekayaan melalui mekanisme seperti perpajakan, inflasi, dan sedekah.

Secara keseluruhan, keadilan sosial dan keberlanjutan merupakan dua aspek penting yang harus dijaga dalam pembangunan ekonomi dan sosial, baik dari perspektif agama maupun sistem ekonomi. Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan alam, memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Melalui pengelolaan yang adil terhadap sumber daya alam, sistem zakat yang efektif, dan penerapan ekonomi berkelanjutan, Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi umat manusia.

REFERENSI

- Amin, D. (2023). Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Rahma Zhafirah, Djauharotun Nafisah, Siti Nur Jannah, & Renny Oktafia. (2024). Partisipasi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen*

- Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 95-106.
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13-32.
- Hidayat, M.S., Kunci, K., Syariah, E., Keuangan, K., & Ekonomi, K. (2023). Mengurai Potensi Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam Melalui Studi Literatur. *Alamiah : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*.
- Kurniawan. (2009). *Kemiskinan Di Indonesia Dan Solusinya*. (2009). *Gema Eksos*, 5(1), 1-18.
- Dewi Savitri, & Madian Muhammad Muchlis. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara. *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(3), 1-18.
- Musliminm., & Darwantod. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 136-161.
- Mohammad Haikal, & Musradinur, M. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245-258.
- Muzakki, Z. (2023). Integrasi Ilmu Ekonomi Islam Dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0. *Islamic Banking & Economic La*
- Mamluatun Nafisah. (2019). Tafsir Ekologi. *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 93-112.
- Nur, Ubaid, & Elia. (2021). *Analisis Dampak Zakat Terhadap Perekonomian Untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin*. Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah Vol. 03 No. 02
- Nurul Azisah Syahrani Haris, Andi Muh Reza Caecar Arfan, Andi Muhammad Aflah, & Kurniati Kurniati. (2024). Eksistensi Etika Politik Islam Dalam Pemerintahan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 197-209.
- Ilham Budiman Panggabean, Aprilinda Martinondang Harahap (Author). (2024). *Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)*. Kamaya: *Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 1-15.
- Rahmawati, A. (2014). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-17.
- Sumarta, S. (2024). Etika Islam Sebagai Fondasi Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif Dan Berkeadilan: Etika Islam, Ekonomi Inklusif Dan Berkeadilan. *Jurnal Tasyri' : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 65-79.
- Tanza, & Sri. (2024). *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 2024, 807-820
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Sustainable Economic Development As Indonesia's National Interest In The G-20 Presidency. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.

- Arfah, A., & Arif, M. (N.D.). *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*.
- Asdlori, A. (2023). Pendidikan Islam Sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Peran Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Implementasi Sdgs. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 124. <https://doi.org/10.32529/Al-Ilmi.V6i1.2530>
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i2.491>
- Chairunisa, P., & Gur, F. L. (2023). *Menyelami Kebaikan Hati: Pentingnya Zakat Dalam Merangkul Keadilan Sosial Dalam Islam*. 1(3).
- Darda, A. (2015). *Integrasi Ilmu Dan Agama: Perkembangan Konseptual Di Indonesia*. 10(1).
- Fadilla, M., Nurmawati, E., Iqbal Fasa, M., & Suharto, S. (2022). Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Jeksyah (Islamic Economics Journal)*, 2(01), 54–63. <https://doi.org/10.54045/Jeksyah.V2i01.70>
- Fitria. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Hakim, A. (2020). Menekan Angka Kesenjangan Sosial Di Indonesia Melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.29300/Ba.V5i2.3365>
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131. <https://doi.org/10.18592/Khazanah.V18i1.3483>
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i6.2773>
- Nuridin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.22373/Ujhk.V5i1.14665>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1458>
- Ridwan, M. (2017). Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia*, 15(2), 199. <https://doi.org/10.21154/Dialogia.V15i2.1191>
- Risal. (2021). Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Sosains*.
- Saftri, E., & Sa'dudin, I. (2019). Aplikasi Integrasi Interkoneksi Keilmuan Di Lembaga Pendidikan Tinggi. *Tadrib*, 5(1), 122–137. <https://doi.org/10.19109/Tadrib.V5i1.2731>

- Sulbi, S. (2021). Islam Kemodernan Dan Keadilan Sosial Dalam Pandangan Nurcholish Madjid. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 6(1), 1–24. <https://doi.org/10.24256/Pal.V6i1.1200>
- Undang, G., & Thamrin, H. (2017). Konflik Dan Integrasi Islam Politik. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2), 177. <https://doi.org/10.24014/Af.V15i2.4014>
- Yudha, G. (2021). *Diakronik Politik Islam*.